

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DI STATISTIK BIRO TENGAH KABUPATEN SIGI**

***IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS TOWARD QUALITY OF
FINANCIAL STATEMENTS IN STATISTICS CENTRAL
BUREAU OF SIGI REGENCY***

¹Megawati, ²Ali Supriadi, ³Andi Darmawati

^{1,2,3}*Bagian Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : eghamega021@gmail.com)

(Email : supriadi.ali123@gmail.com)

(Email : darmawati.watiandi021@gmail.com)

ABSTRAK

Sampel penelitian ini adalah Biro Pusat Statistik Kabupaten Sigi yang dalam penyusunan laporan keuangannya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik di pemerintahan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan pada pelaporan tcnical ICS di Biro Pusat Statistik Kabupaten Sigi, setiap bulan mereka diminta untuk menyerahkan laporan yang telah diverifikasi oleh BPS-RI sebagai bagian dari ICS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang dapat menjelaskan hubungan antara penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan melihat kinerja manajer keuangan dan melakukan pengamatan langsung terhadap sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi kinerja manajer keuangan dan laporan keuangan di Biro Pusat Statistik di mana Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini 'reasedonable' tanpa terkecuali. Dari pendapat yang diperoleh Biro Pusat Statistik, dapat dibuktikan bahwa kualitas laporan keuangan sudah sesuai dengan kriteria PP 71 tahun 2010 yang relevan, andal, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan.

Kata Kunci : Pengendalian, kualitas, laporan keuangan

ABSTRACT

The sample of this research is the Statistics Central Bureau of Sigi Regency which in preparing the financial statements, they refer to the government regulation number 71 of 2010 on government accounting standards and the principles of good financial management in government which include the budget realization report, balance sheet, operational report, equity changes report and notes on the financial statements on ICS technical reporting at Statistics Central Bureau of Sigi Regency, every month they are required to submit reports that have been verified by BPS-RI as a part of the ICS. The method used in this research is descriptive that can explain the relationship between the application of internal control system to the quality of financial statements by looking at the performance of the financial managers and carrying out direct observations on the sources. Results of this reserach

indicate that the Internal Control System affects the performance of financial managers and financial reports at the Statistics Central Bureau in which the Supreme Audit Agency has provided 'reasonable' opinion without any exception. From the opinion obtained by Statistics Central Bureau, it can be proved that the quality of financial statements are in accordance with the criteria of PP 71 of 2010 that is relevant, reliable, understandable and comparable.

Keywords : *Control, quality, financial reports*

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik kabupaten Sigi adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang berkewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan itu sendiri dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern di BPS Kabupaten Sigi mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dimana pada teknis laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di BPS Kabupaten Sigi, setiap bulannya diwajibkan mengirimkan laporan-laporan yang sudah ditetapkan oleh BPS RI sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) Dimana *deadline* atau batas pelaporannya adalah tiap tanggal 15 bulan berikutnya. Misal : Laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Januari 2017, maka *deadline* adalah tanggal 15 Februari 2017. Dan jika pada tanggal 15 merupakan hari libur kantor atau bertepatan dengan tanggal merah maka *deadline* jadi maju ke hari sebelumnya.

Tata cara pelaporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diterapkan pada satker BPS yaitu melalui online. Pelaporan SPI dilakukan dengan meng-upload dokumen-dokumen yang telah ditentukan ke alamat yang telah disiapkan oleh BPS RI. Pada saat telah selesai melakukan upload dokumen yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maka setiap satker harus melakukan konfirmasi via email kepada inspektorat yg bertanggungjawab untuk memeriksa SPI termasuk BPS Kabupaten Sigi.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) mulai berlaku di satker BPS sendiri semenjak diberlakukannya peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam peraturan pemerintah, pemikiran tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) ini melekat pada setiap kegiatan yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai dan bukan keyakinan yang mutlak.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena yang ada di BPS Kab. Sigi dimana pada penerapan Reformasi Birokrasi (RB) itu tidak hanya pada kegiatan teknis saja namun berlaku juga pada kegiatan administrasi yang sangat berpengaruh terhadap hasil opini BPK, yang mana hasil audit BPK tahun 2016 BPS meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan sebuah prestasi setelah tahun sebelumnya opini laporan keuangan BPS turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola Anggaran yang terdiri dari: Kepala BPS Kabupaten Sigi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pejabat yang bertugas dalam membantu KPA dalam mengelola anggaran, Pejabat Penandatangan/Penguji SPM dan Bendahara. dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah para pengelola keuangan yang terdiri dari 4 orang yaitu : 1) Ir. Jefrie Wahido, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 2) Teni Trisnawaty, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 3) Nur Ifah selaku Pejabat Penandatangan/Penguji SPM, DAN 4) Nunik Indriwati, SE.MM selaku Bendahara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui Metode pengamatan (*Observasi*), Wawancara (*Interview*), dan Dokumen. Analisis data yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah analisis deskriptif,. Penelitian ini digunakan untuk menguji rumusan masalah yang ada, yaitu penerapan sistem pengendalian intern, pengelola keuangan terhadap kualitas laporan keuangan BPS Kabupaten Sigi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

SPIP diadopsi dari sebuah konsep yang mencoba mengaitkan terjadinya perubahan bertahap terhadap sistem pengendalian intern. Konsep ini telah disempurnakan berdasarkan pengalaman selama menjalankan dan mempelajari sistem pengendalian intern. SPIP mencoba meninggalkan pemahaman sistem pengendalian intern yang semula hanya berbasis *accounting control* dan *administrative control* kemudian dapat dipadukan dengan unsur lingkungan pengendalian (*control environment*). Meskipun demikian, SPIP masih tetap mengaitkan tanggung jawab audit dengan laporan keuangan. Konsep SPIP diadopsi dari sebuah grup studi: *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO), berdasarkan publikasi laporan *Internal Control-Integrated Framework* (September 1992).

Pengaruh penerapan SPI terhadap Kualitas penyusunan Laporan Keuangan pada BPS Kabupaten Sigi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik secara umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dengan demikian, jika sistem pengendalian intern pada BPS Kabupaten Sigi menjalankan unsur-unsur SPIP dengan baik dan maksimal maka akan tercipta kualitas informasi keuangan yang baik pula. Ini terbukti bahwa secara berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan 2016 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (*WTP*). Dari opini yang didapat oleh BPS tersebut dapat membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan sudah sesuai dengan kriteria PP 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Keterangan :

- WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
- WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
- WDP : Wajar Dengan Pengecualian
- TMP : Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*)

1. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada

kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Kita dapat melihat pada pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Sedangkan yang dimaksud dengan opini telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 11 yakni pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Penjelasan atas UU Nomor 15 Tahun 2004 di atas juga menyatakan bahwa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria-kriteria seperti :

- a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah
- b. efektivitas penilaian internal
- c. kecukupan pengungkapan informasi
- d. kepatuhan pada peraturan perundang-undangan

2. WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)

Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain

3. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada

opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar

Apakah penerapan SPI sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa pada BPS Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa penerapan SPIP telah memadai, yang berarti bahwa pada kegiatannya sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari simpulan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan sudah sesuai dengan kriteria PP 71 tahun 2010.

Hal tersebut dapat dikuatkan dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Beberapa kebijakan yang terkait dengan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel tersebut, serta terkait dengan sistem pengendalian intern antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam Pasal 58 Ayat (1) dijelaskan bahwa “dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh”.

Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait”. Sesungguhnya sejak tahun 2004 pemerintah telah menerbitkan kebijakan pada tataran teknis yang terkait dengan pelaksanaan pengendalian intern, yaitu Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, yang menurut keputusan tersebut merupakan padanan istilah pengendalian intern. Dalam pedoman tersebut disebutkan beberapa aspek pengendalian intern, meliputi:

- a. pengorganisasian;
- b. personil;
- c. kebijakan;
- d. perencanaan;
- e. prosedur;
- f. pencatatan;
- g. pelaporan; dan
- h. supervisi dan review intern.

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan Negara.

Apakah penerapan Sisteem Pengendaian Intern (SPI) berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan BPS Kab. Sigi

Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa penerapan SPI sangat berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan pada BPS Kabupaten Sigi. dimana dalam rangka peningkatan Reformasi Birokrasi, BPS menjalankan program Penguatan Sistem Pengawasan yang bertujuan untuk:

1. peningkatan kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) melalui DIKLAT dan BIMTEK terkait
2. Penerapan Sistem Pengawasan yang Independent, Profesional, dan Bersinegri
3. Penerapan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN
4. Peningkatan efesiensi penyelenggaraan birokrasi
5. Penurunan tingkat penyimpangan aparatur
6. Upaya mempertahankan opini WTP-BPK

Selanjutnya BPS Kabupaten Sigi menjalankan program Penguatan Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
2. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan professional
3. Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi)
4. Peningkatan akuntabilitas aparatur.

Pada dasarnya sistem pengendalian intern ini dilandasi oleh pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BPS Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, dan penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Kinerja Pengelola keuangan pada BPS Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu peneliti merekomendasikan saran Penyusun/pengguna laporan keuangan berpersepsi jika opini laporan keuangan WTP maka berarti bebas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Sigi, 2013. *Laporan Keuangan*
- BPS Kabupaten Sigi, 2014. *Laporan Keuangan*
- BPS Kabupaten Sigi, 2016. *Laporan Keuangan*
- Kurniawan Budi Raharjo, “*Pemahaman SPI (Sistem Pengendalian Intern)*”
<https://kurniawanbudi04.wordpress.com>, Diakses pada tanggal 14 January 2013.
- Mulyani, Pujianik. 2011. *Analisis Peran Dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No.60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 7, Nomor 2.*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.*

LAMPIRAN

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI TERHADAP
				TARGET (%)
1	2012	2.062.814.000	1.163.851.306	56,42
2	2013	4.809.490.000	4.475.972.349	93,06
3	2014	3.654.091.000	3.407.961.097	93,26
4	2015	5.858.177.000	4.727.288.489	80,69
5	2016	4.448.599.000	4.074.672.445	93,43

Sumber: BPS Kabupaten Sigi

Tabel 2. Rincian Laporan Realisasi Anggaran Badan Pusat Statistik Kab. Sigi Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	PENDAPATAN					
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	38.728.920	1.619.953	1.484.000	1.957.068	2.513.491
	JUMLAH PENDAPATAN	38.728.920	1.619.953	1.484.000	1.957.068	2.513.491
2	BELANJA					
	Belanja Pegawai	847.625.558	1.060.235.500	1.772.737.667	2.187.195.425	2.337.225.539
	Belanja Barang	276.374.520	1.879.785.461	1.113.326.430	2.197.784.890	1.714.402.775
	Belanja Modal	108.837.592	1.535.951.388	521.897.000	342.912.000	23.044.131
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	1.232.837.670	4.475.972.349	3.407.961.097	4.727.892.315	4.074.672.445

Sumber: BPS Kabupaten Sigi

Tabel 3. Laporan Neraca Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi

No	Tahun	Ekuitas	Kewajiban	Jumlah
1	2012	2.328.609.477	1.714.916	2.330.324.393
2	2013	2.701.600.031	4.280.809	2.705.880.840
3	2014	2.978.279.711	56.474.901	3.034.754.612
4	2015	3,057,029,581	80,862,281	3,137,891,862
5	2016	2,828,135,533	65,228,464	2,893,363,997

Sumber : BPS Kabupaten Sigi

**Tabel 4. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sigi Tahun 2012-2016**

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	ASET					
1	ASET LANCAR					
	Persediaan	31.623.250	3.911.376	425.600	2.784.830	2.214.830
	Jumlah Aset Lancar	31.623.250	3.911.376	425.600	2.784.830	2.214.830
2	ASET TETAP					
	Tanah	-	231.700.800	231.700.800	231.700.800	231.700.800
	Peralatan dan Mesin	-	1.137.418.074	1.146.009.497	1.568.855.468	1.725.570.094
	Gedung dan Bangunan	-	1.609.653.000	2.126.150.000	2.175.892.000	2.175.892.000
	Aset Tetap lainnya	781.574.160	7.670.200	7.670.200	18.737.376	28.959.317
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	(368.114.110)	(623.592.315)	(945.571.681)	(1.287.073.071)
	Jumlah Aset Tetap	781.574.160	2.618.327.964	2.889.438.182	3.049.613.959	2.875.049.140
3	ASET LAINNYA					
	Aset Tak Berwujud	-	76.994.500	76.994.500	76.944.500	76.994.500
	Aset Lain-Lain	-	750.000	19.950.000	21.450.000	21.450.000
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	-	(150.000)	(8.528.571)	(12.381.427)	(82.914.473)
	Jumlah Aset Lainnya	-	77.594.500	88.415.929	86.013.073	15.530.027
4	JUMLAH ASET	813.197.410	2.705.880.840	2.978.279.711	3.137.841.862	2.893.363.997
B	KEWAJIBAN					
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	1.233.809	56.474.901	80.862.281	65.228.464
	Jumlah Kewajiban	22.126.000	3.047.000	-	80.862.281	65.228.464

Jangka Pendek						
JUMLAH KEWAJIBAN						
	22.126.000	4.28.809	56.474.901	80.862.281	65.228.464	
C	EKUITAS					
	Ekuitas	791.071.410	2.701.600.031	2.921.804.810	3.057.029.581	2.828.135.533
JUMLAH EKUITAS						
	791.071.410	2.701.600.031	2.921.804.810	3.057.029.581	2.828.135.533	
D	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
	813.197.410	2.075.880.840	2.978.279.711	3.137.891.862	2.893.363.997	

Sumber: BPS Kabupaten Sigi

Tabel 5. Opini Hasil Audit Bpk Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi

No	BA	Kementerian Negara / Lembaga	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
37.	054	Badan Pusat Statistik	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPK